

FUNDAMENTAL EKONOMI DAN KRISIS EKONOMI INDONESIA

Sahabudin Sidiq

Abstract

Since July 1997, Asia-Pacific countries have been fighting to handle monetary crisis they face. Among those countries, few countries are able to handle the crisis relatively quickly while Indonesia seems to have a difficulty in handling the crisis. As this article extends, it happens because the fundamental of the Indonesian economy is less weak rather than those countries.

This article extends that there are indicators indicating the weaknesses of the Indonesian economy: (1) there is deficit of the balance of payment, (2) the production pattern is only dominated by few commodities, (3) some industries are oligopolistic, (4) the banking system is unsound. This article extends that Indonesian government should solve those weaknesses in order to solve the crisis.

Dalam dasawarsa 1990-an sebelum terjadinya krisis, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi. Tahun 1994 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 7,3%, tahun 1995 sebesar 7,5% dan tahun 1996 menjadi 7,3%. Namun tingginya laju

pertumbuhan ekonomi dibayangi resiko suhu perekonomian yang semakin memanas. Hal itu ditandai dengan laju inflasi yang semakin meningkat. Pada tahun 1994, tingkat inflasi 8,5%, tahun 1995 meningkat menjadi 9,5% dan tahun 1996 sebesar 8,5%.

Tabel 1
Indikator Ekonomi Enam Negara DAES
plus Indonesia dan China
tahun 1994 – 1996

Negara DAES	Pertumbuhan Ekonomi (%)			Laju Inflasi		
	1994	1995	1996 *	1994	1995	1996 *
Korsel	8,4	9,0	7,5	6,2	5,0	6,0
Taiwan	6,1	6,3	6,0	4,1	3,8	3,8
Hongkong	5,5	5,0	4,8	8,1	9,0	8,8
Singapura	10,1	8,2	7,5	3,5	2,3	2,5
Thailand	8,5	8,7	8,2	5,1	5,5	5,3
Malaysia	8,7	9,6	8,5	3,7	3,6	3,5
China	11,8	9,5	10,5	21,7	15,5	13,0
Indonesia	7,3	7,5	7,3	8,5	9,5	8,5
Rata-rata	8,3	8,0	7,5	7,6	6,7	6,4

*) perkiraan

Sumber: *Economic Outlook*. OECD, 1995 dan sumber lainnya

Tingkat pertumbuhan ini juga terjadi di negara-negara kawasan Asia pasifik, terutama negara yang tergolong DAEs (*Dynamic Asian Economies* : Hongkong, Korea selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Thailand). Tabel 1 menunjukkan tingkat pertumbuhan dan tingkat inflasi di negara Indonesia, China dan negara yang tergolong DAEs. Pertumbuhan rata-rata negara-negara yang tersebut, tahun 1994 sebesar 8,3%, tahun 1995 sebesar 8,0% dan tahun 96 sebesar 7,5%. Tingkat inflasinya pada tahun 1994 sebesar 7,6%, tahun 1995 sebesar 6,7% dan tahun 1996 sebesar 6,4%.

Namun, pada pertengahan tahun 1997 krisis moneter melanda negara-negara DAEs, yang sebelumnya mempunyai indikator-indikator ekonomi yang menakutkan. Adanya krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi ini ada beberapa negara bisa dengan cepat mengatasi krisis tersebut, akan tetapi ada beberapa negara, seperti Indonesia, lambat dalam mengatasi krisis ekonomi ini. Hal ini dikarenakan fundamental ekonomi Indonesia sangat rapuh.

Tulisan ini ingin melihat fundamental ekonomi Indonesia ditinjau dari sisi makro. Lebih spesifik lagi, tulisan ini ingin melihat fundamental ekonomi Indonesia bila ditinjau dari neraca pembayaran, sektor produksi dan sektor moneter.

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

Pada dasarnya, neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen. Komponen *pertama* adalah neraca perdagangan (*balance of trade*) yang merupakan selisih dari nilai ekspor dan impor barang-barang.

Neraca perdagangan non migas Indonesia dari tahun 1994/1995-1996/1997 mengalami fluktuasi. Pada tahun 1994/95 terjadi surplus neraca perdagangan sebesar 1.240 juta dollar AS, tahun 1996/97 defisit

1.322 juta dollar AS dan tahun 1996/97 surplus 1.678 juta dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia umumnya selalu surplus, yang berarti nilai ekspor-barang-barang melebihi nilai impornya. Tetapi perlu dicatat bahwa di dalamnya termasuk ekspor dan impor minyak dan gas bumi. Bila migas ini dikeluarkan, maka neraca perdagangan akan defisit.

Komponen *kedua* adalah neraca jasa-jasa, yang merupakan selisih antara ekspor jasa-jasa dengan impor jasa-jasa. Neraca jasa-jasa ini selalu mengalami defisit yang lebih besar dari pada surplus pada neraca perdagangan. Defisit neraca jasa-jasa dari tahun 1994 -1997 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 1994/95 neraca jasa-jasa defisit 11.527 juta dollar AS, tahun 1996/1997 defisit 13.001 juta dollar AS dan tahun 1996/1997 defisit 14.667 juta dollar AS. Penyebab defisit pada neraca jasa-jasa adalah besarnya pembayaran bunga utang luar negeri dan juga jasa-jasa transportasi untuk ekspor-impor.

Apabila kedua neraca itu digabung, neraca perdagangan dan neraca jasa-jasa, maka akan diperoleh neraca transaksi berjalan (*current account*). Sejak Pelita I sampai saat ini, neraca transaksi berjalan selalu mengalami defisit. Data terakhir menunjukkan defisit transaksi berjalan dalam tahun 1994/1995 sebesar 3,5 milyar dollar AS, tahun 1995/1996 sebesar 7,9 milyar dollar AS dan tahun 1996/1997 sebesar 6,9 milyar dollar AS. Dilihat dari rasio terhadap PDB, perkembangan defisit transaksi berjalan selama tiga tahun terakhir kian besar. Pada tahun 1994/95 defisit transaksi berjalan masih 2% dari PDB, dan ini meningkat menjadi 3,3% pada tahun 1995/96.

Beberapa penyebab defisitnya neraca transaksi berjalan adalah *pertama* defisit pada neraca jasa-jasa. Jasa-jasa yang harus di bayar oleh Indonesia memang tidak

pernah menurun, terutama bunga utang luar negeri. Depresiasi rupiah terhadap dolar saat ini akan semakin memperberat defisit pada neraca jasa-jasa. Pada sektor jasa transportasi ekspor-impor Indonesia banyak menggunakan jasa angkutan asing. Keadaan ini akan memperbesar defisit transaksi berjalan. Sebagai contoh, untuk jasa kontainer saja Indonesia masih menggunakan jasa asing. Hal ini dapat dilihat ketika eksportir pernah kesulitan untuk mendapatkan kontainer untuk eksportnya. Sebab *kedua* adalah menurunnya surplus perdagangan yang diakibatkan oleh persentase kenaikan impor lebih besar dari persentase kenaikan ekspor.

Komponen *ketiga* dalam neraca pembayaran adalah yang menyangkut lalu-lintas modal (*Capital Account*). Neraca modal ini merupakan selisih antara aliran modal masuk dan modal keluar. Neraca modal selalu surplus, yang berarti lebih banyak aliran modal masuk dari pada arus modal keluar. Aliran modal masuk terdiri dari pemasukan modal pemerintah, berupa bantuan luar negeri atau tepatnya pinjaman luar negeri yang dalam APBN disebut sebagai penerimaan pembangunan, dan modal swasta yang dalam APBN disebut sebagai pemasukan modal lainnya, baik dalam bentuk penanaman modal maupun dalam bentuk pinjaman swasta. Sedangkan aliran modal keluar adalah berupa pembayaran utang pokok.

Dari uraian tentang struktur neraca pembayaran di atas, yang menjadi permasalahan utama adalah defisitnya neraca transaksi berjalan. Dengan defisitnya neraca transaksi berjalan yang terus-menerus dan sangat besar akan mengurangi kepercayaan terhadap rupiah. Berkurangnya kepercayaan terhadap rupiah menyebabkan orang memburu valuta asing untuk tujuan spekulasi. Oleh karenanya, ketika terjadi krisis moneter nilai rupiah tidak stabil dan pemerintah lambat untuk mengatasinya, karena begitu besarnya defisit neraca transaksi berjalan.

Bila dilihat dari besarnya *Debt Service Ratio* (DSR) Indonesia relatif besar. pada tahun 1994/95 sebesar 32,6%, tahun 1995/96 sebesar 33,7% dan tahun 1996/97 sebesar 30,8%. Menurut teori, ambang batas DSR yang aman adalah sebesar 20%. Sebagai perbandingan DSR negara-negara ASEAN lainnya pada tahun 1994, Malaysia 7,9%, Philipina 21,9% dan Thailand 16,3%.

PRODUKSI DAN PERKEMBANGANNYA

Perkembangan produksi beberapa komoditi penting secara absolut dapat dilihat pada tabel 3. Tahun 1995 terjadi peningkatan produksi komoditi-komoditi penting. Pola produksi Indonesia hanya didominasi oleh beberapa komoditi saja. Atau dengan kata lain belum terjadi penyebaran yang merata.

Sektor pertanian masih terkonsentrasi pada produksi beras, sedangkan produksi buah-buahan dan sayuran belum menunjukkan kontribusi yang besar. Komoditi yang menonjol pada sektor industri, masih tetap yaitu, tekstil kayu-lapis dan semen.

Sektor industri dari tahun ke tahun semakin besar peranannya dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan sektor industri terhadap PDB yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sektor industri merupakan tumpuan masa depan ekonomi Indonesia, sebab sudah diputuskan strategi pembangunan lebih dititik beratkan pada sektor industri, terutama industri komoditi non migas. Ini dibuktikan dengan semakin besarnya laju pertumbuhan PDB sektor ini dibandingkan dengan sektor pertanian.

Ketika harga minyak dunia anjlok, Indonesia mengganti strategi industri substitusi import menjadi *export oriented*. Strategi ini menuntut efisiensi agar bisa bersaing di pasaran Internasional, termasuk di dalamnya menghilangkan berbagai proteksi. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan iklim bisnis yang kondusif. Di sini visi da-

gang Indonesia harus merebut konsumen internasional, apalagi pada saat globalisasi nanti. Untuk itu, Indonesia harus menciptakan komoditi yang berorientasi ekspor.

Untuk saat ini komoditi Industri di Indonesia masih didominasi oleh: semen, kayu lapis, tekstil dan baja. Komoditi lainnya masih belum begitu berperan. Pada komoditi industri semen masih ada proteksi dari

pemerintah, tata niaganya juga masih belum kondusif. Saat ini ada kebijakan pemerintah menghapuskan HPS, yang dikawatirkan akan meningkatkan harga semen, karena industri semen, struktur pasarnya Oligopoli. Justru yang jadi masalah sebenarnya adalah tentang pembagian wilayah pemasaran semen yang harus ditiadakan.

Tabel 2
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA
1994/1995 - 1996/1997 (dalam juta dollar AS)

	1994/1995 (Riil)	1995/1996 (Riil)	1996/1997 (perk.)
1. EKSPOR, <i>FOB</i>	-42.161	46.904	53.264
a. minyak bumi	6.312	5.865	5.067
b. gas alam cair	4.133	4.031	3.973
c. bukan minyak dan gas alam	31.716	37.008	44.224
2. IMPOR, <i>FOB</i>	-34.122	-41.846	-45.471
a. minyak bumi	-3.383	-3.246	-2.661
b. gas alam cair	-263	-270	-264
c. bukan minyak dan gas alam	-30.476	-38.330	-42.546
3. JASA-JASA	-11.527	-13.001	-14.667
a. minyak bumi	-1.557	-1.625	-2.521
b. gas alam cair	-1.455	-1.531	-1.526
c. bukan minyak dan gas alam	-8.515	-9.855	-10.620
4. TRANSAKSI BERJALAN	-3.488	-7.943	-6.874
a. minyak bumi	1.372	994	-115
b. gas alam cair	2.415	2.230	2.183
c. bukan minyak dan gas alam	-7.275	-11.167	-8.942
5. SPECIAL DRAWING RIGHT	0	0	0
6. PEMASUKAN MODAL PEMERINTAH	5.651	5.721	5.709
a. bantuan program	0	0	0
b. bantuan proyek dan lainnya	5.651	5.721	5.709
7. PEMBAYARAN HUTANG POKOK	-5.546	-6.052	-5.314
8. LALU LINTAS MODAL LAINNYA	4.645	10.640	9.744
9. TOTAL (4 s.d. 8)	1.262	2.366	3.265
10. SELISYANGBELUMDAPAT DIPERHITUNGAN	-646	-325	0
11. LALU LINTAS MONETER	-616	-2.041	-3.265
DSR			
- Pemerintah	20,4	20,0	16,4
- Nasional	32,6	33,7	30,8

Sumber : *Nota Keuangan dan APBN, 1990*

Tabel 3
Perkembangan Produksi Beberapa Komoditi Penting

Komoditi	1992	1993	1994	1995
Pertanian Pangan				
- Padi (juta ton)	48,2	48,2	49,1	50,0
- Buah-buahan (juta ton)	5,5	5,9	6,5	7,1
- Sayuran (juta ton)	5,0	5,1	5,2	5,3
Perikanan Laut (juta ton)	3,5	3,6	3,8	4,0
Peternakan				
- Ayam (juta ton)	3,1	3,4	3,7	4,0
Perkebunan				
- Kopi (ribu ton)	432,9	439,4	448,5	460,5
- Kakao (ribu ton)	153,5	169,6	194,0	215,3
Industri				
- Semen (juta ton)	16,2	17,9	21,8	23,5
- Tekstil (miliar m)	5,3	5,6	5,9	6,2
- Kayu lapis (juta m ³)	8,5	9,0	9,6	10,3
- Baja slab (ribu ton)	963,0	1.007,0	1.118,0	1.215,0
- Elektronika (juta unit)	5,2	6,7	9,1	12,3
Pertambangan				
- Minyak bumi (juta barrel)	552,0	547,0	556,0	576,0
- Gas alam (juta MCF)	2,586	2.662	2.868	3.146

Sumber : *Business News*, 1998

Dari komoditi di atas, tekstil merupakan komoditi yang paling besar kontribusinya dalam ekspor Indonesia. Namun demikian, ekspor komoditi andalan tersebut saat ini perkembangannya tidak sepesat yang diharapkan. Hal ini terjadi karena nilai ekspor tekstil sejak 1993 terus mengalami perlambatan, bahkan menurun. Dilihat dari nilai ekspor tekstil sebesar 6,050 milyar dollar AS, masih lebih besar dari ekspor tahun 1995 yang hanya sebesar 6,04 milyar dollar AS.

Industri di Indonesia kebanyakan masih substitusi impor, sehingga bahan baku yang digunakan kebanyakan harus diimpor. Ketika terjadi krisis moneter, banyak indus-

tri tersebut ambruk, karena harga bahan baku melonjak pesat.

SEKTOR MONETER

Sejak Kebijakan pakto 1988, yakni deregulasi dalam bidang keuangan, moneter dan perbankan, pertumbuhan bank-bank baru dan kantor cabang melonjak tajam. Pada tahun 1987 jumlah bank umum tercatat 100 bank, meningkat menjadi 280 pada tahun 1992 dan 239 pada tahun 1996. Jumlah kantor cabang pada tahun 1987 meningkat dua kali lipat dari 1.941 menjadi 6.005 buah pada akhir tahun 1994. Sementara itu, jumlah BPR meningkat dari 8.041 menjadi 9.193 BPR dalam kurun waktu yang sama.

Kemudahan dalam perluasan jaringan dan pendirian bank baru mengakibatkan posisi dana yang dihimpun perbankan meningkat dari Rp 35,7 trilyun pada tahun 1988 menjadi Rp 54,5 trilyun pada tahun 1989.

Selain itu, *Reserve Requirement* diturunkan dari 15% menjadi 2%. Hal ini mengakibatkan peningkatan dana yang sangat nyata. Akibatnya, posisi kredit perbankan naik dari Rp 44 trilyun pada tahun 1988, menjadi Rp 63,6 trilyun pada tahun 1989. Kemudian dampak ini terus berlanjut pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990 dana yang dihimpun perbankan sebesar Rp 83,2 trilyun, tahun 1991 sebesar Rp 95,1 trilyun, tahun 1992 sebesar Rp 114,9 trilyun, tahun 1993 sebesar Rp 142,7 trilyun, tahun 1994 sebesar Rp 170,4 trilyun dan tahun 1995 menjadi Rp 204,1 trilyun. Posisi penghimpunan

dana pada tahun 1990 - 1995, rata-rata 42,4% oleh bank pemerintah, 47,5% oleh bank swasta nasional, 3,4% oleh Bank Pembangunan Daerah dan 6,7% oleh bank asing dan campuran.

Peningkatan dana yang dihimpun oleh perbankan diikuti juga oleh peningkatan kredit perbankan. Pada tahun 1990 kredit perbankan sebesar Rp 111,4 trilyun, tahun 1992 sebesar Rp 127,7 trilyun, tahun 1993 sebesar Rp 163,3 trilyun, tahun 1994 sebesar Rp 202,8 trilyun dan tahun 1995 sebesar Rp 235,6% trilyun. Pangsa kredit rata-rata bank pemerintah tahun 1990-1995 adalah 44,4%, bank swasta nasional 36,3%, Bank Pembangunan Daerah 2,1%, bank asing dan campuran 7,8% dan Bank Indonesia sebesar 9,5%.

Tabel 4
Posisi Penghimpunan Dana (Rp/ Valas) Menurut klompok Bank
(dalam Rp. Trilyun) periode 1990 - 1995

KELOMPOK BANK	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Rata-rata (%)
1. Bank Pemerintah	40,6	41,8	52,6	61,7	71,4	71,4	42,4
Pangsa thd total (%)	48,8	44,0	45,8	43,2	37,7	35,0	
2. Bank Swasta Nas..	34,0	43,1	51,1	67,5	88,93	112,3	47,5
Pangsa thd total (%)	40,8	45,4	44,5	47,3	52,2	55,0	
3. BPD	2,6	3,2	3,7	4,8	6,2	7,4	3,4
Pangsa thd total (%)	3,1	3,4	3,2	3,6	3,6	3,6	
4. Bank Asing & Camp.	6,0	6,9	7,5	8,7	11,0	13,1	6,7
Pangsa thd total (%)	7,2	7,3	6,5	6,1	6,5	6,4	
Jumlah	83,2	95,1	114,9	142,7	170,4	204,1	
Jumlah Pangsa	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BI, *Laporan Mingguan*, Jan 1996

Besarnya pemberian kredit, terutama untuk kredit yang bersifat konsumtif menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat dengan cepat, yang pada akhirnya mendorong inflasi. Seperti diketahui, inflasi terjadi karena banyaknya jumlah uang beredar relatif dibandingkan jumlah barang. Kondisi ini yang mengakibatkan memanasnya suhu perekonomian (*over heating economy*)

Jumlah uang beredar (M1) pada tahun 1990- 1995, terus meningkat. Tahun 1990 M1 sebesar 23,8 trilyun naik menjadi 50,4 pada tahun 1995. Sedangkan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada tahun 1990 sebesar 84,6 trilyun, naik menjadi 211,1 trilyun pada tahun 1995. Melihat

jumlah uang beredar (M1 dan M2) yang semakin meningkat tersebut, maka pemerintah mengurangi jumlah uang beredar tersebut dengan cara pengendalian ekspansi kredit oleh perbankan dan juga melalui kenaikan RR.

Melihat fenomena sektor moneter di atas, menunjukkan bahwa perkembangan sektor moneter sangat ekspansif, sehingga menimbulkan inflasi. Laju inflasi secara kumulatif pada tahun 1994 sebesar 8,5 %, tahun 1995 sebesar 9,5 dan tahun 1996 sebesar 8,5%. Laju inflasi yang tinggi tersebut disebabkan pula oleh munculnya gangguan pasokan bahan-bahan makanan, disamping kuatnya permintaan domestik, khususnya kegiatan investasi sektor properti.

Tabel 5
Kredit Perbankan Menurut Kelompok Bank
(Rp. Trilyun) 1990 -1995

KELOMPOK BANK	1990	1991	1992	1993	1994	1995	rata2 (%)
1. Bank Pemerintah	53,5	59,9	68,2	71,5	80,0	91,4	
Pangsa thd total (%)	48,0	46,9	49,4	43,8	39,5	38,8	44,4
2. Bank Swasta Nas.	35,0	41,8	42,3	60,4	86,3	101,7	
Pangsa thd total (%)	31,4	32,8	30,6	37,0	42,7	43,2	36,3
3. BPD	2,3	2,6	3,0	3,6	4,2	5,0	
Pangsa thd total (%)	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
4. Bank Asing & Camp.	6,2	8,5	9,3	14,7	18,7	22,8	
Pangsa thd total (%)	5,6	6,7	6,8	9,0	9,1	9,7	7,8
Jumlah	97,0	112,8	122,9	150,3	188,9	220,9	
5. Bank Indonesia*)	14,4	14,9	15,4	13,0	13,9	14,8	
	12,9	11,7	11,1	7,95	6,9	6,3	9,5
Jumlah	111,4	127,7	138,3	163,3	201,8	235,6	
Jumlah Pangsa	100	100	100	100	100	100	100

*) termasuk kredit likuiditas

Sumber : *Bank Indonesia*, 1996

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa paket kebijakan Oktober 1988 telah mengakibatkan jumlah bank yang beroperasi semakin banyak, sehingga persaingan semakin ketat. Hal ini tidak mengakibatkan kinerja perbankan semakin baik, tetapi justru semakin kurang baik. Banyak bank hanya mengejar target profit sementara sehingga melonggarkan ketentuan *Bank of International of Settlement* (BIS). Sebagian besar bank yang tidak sehat bila dilihat dari laporan Neraca dan Rugi Labanya banyak yang tidak mampu memenuhi ketentuan *Bank of International Settlement* berupa kewajiban rasio kecukupan modal (CAR), tingkat *Reserve Requirement* (RR), ketentuan LDR dan peningkatan jumlah KUK yang disalurkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankan Indonesia sangat lemah, sekaligus merupakan indikator rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia. Banyak bank di Indonesia kesehatannya sangat kurang, sehingga ketika terjadi krisis ekonomi banyak bank-bank yang harus dilikuidasi.

SIMPULAN

Secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup tinggi, na-

mun bila dilihat dari sisi lain memang kondisi ekonomi Indonesia sangat rapuh. Ada beberapa hal yang menjadi indikator ekonomi Indonesia sangat rapuh. *Pertama*, bila dilihat dari neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan selalu mengalami defisit. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia sangat sensitif bila terjadi gejolak global. *Kedua*, pola produksi di Indonesia hanya didominasi oleh beberapa komoditi saja sehingga kurang adanya diversifikasi pendapatan dan sekaligus resiko. *Ketiga*, struktur pasarnya yang cenderung bersifat terkonsentrasi, sehingga praktek-praktek monopoli dan oligopoli terjadi, terutama untuk industri-industri besar. Kebanyakan industri-industri di Indonesia menjadi besar karena fasilitas dari pemerintah, bukan karena persaingan. *Keempat*, sistem perbankan yang sangat lemah, baik dilihat dari sisi manajemen, sumber daya manusia, maupun pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia.

Dengan demikian upaya pemulihan ekonomi dari krisis yang parah saat ini membutuhkan perbaikan-perbaikan mendasar atas masalah-masalah di atas. Upaya-upaya yang terlampau pragmatis dan berjangka pendek, hanya akan mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermanto G., Anton, (1994), *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia
- Boediono, (1995), *Ekonomi Makro*, Yogyakarta, BPFE UGM
- Bruce Glasburner dan Adityawan Chandra, (1994), *Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro*, Jakarta, LP3ES
- Indef, (1996), *Proyeksi Ekonomi 1996*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Prasentiantono, A. Tony, (1990), *Antologi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE UGM
- Suseno Triyanto W, (1990), *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta, PT. Kanisius